

# LAPORAN PENELITIAN

## STRATEGI PENGENTASAN KEMISKINAN PEREMPUAN DI KOTA SEMARANG (Studi Kasus Wanita Rawan Sosial Ekonomi)



Oleh :

Drs. Sundarso, SU

Dra. Retno Sunu Astuti, MSi

Dra. Dewi Rostyaningsih, MSi

Dra. Dyah Lituhayu, MSi

Dibiayai Oleh Dana DIPA UNDIP dari Sumber Dana PNBP FISIP  
Tahun Anggaran 2007

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG

2007

## DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul .....	i
Halaman Pengesahan .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Abstrak .....	iv
Daftar Isi .....	v
BAB I PENDAHULUAN .....	1
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	5
BAB III TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN .....	21
BAB IV METODE PENELITIAN .....	22
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	26
BAB VI PENUTUP .....	64

## ABSTRAK

Hasil evaluasi pengentasan kemiskinan yang dialami oleh WRSE menunjukkan kurang mempunyai daya ungkit dalam menyelesaikan masalah, hal ini bisa dilihat dalam tiga tahun terakhir jumlah WRSE di Kota Semarang mengalami peningkatan dimana pada tahun 2004 berjumlah 1.450 dan pada tahun 2006 sebanyak 1.786 atau mengalami peningkatan sebanyak 27,13%. Penelitian ini bertujuan : mengidentifikasi berbagai kebijakan pemerintah Kota Semarang dalam pengentasan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), melakukan evaluasi kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam pengentasan WRSE, dan merumuskan strategi pengentasan WRSE di kota Semarang.

Penelitian ini dirancang dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengambil lokasi penelitian di Kota Semarang. Adapun tehnik pemilihan informan dilakukan melalui tehnik snowballing, yang melibatkan kelompok sasaran, pelaksana program, LSM dan dinas terkait. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah interview guide, pengamatan langsung dan kajian pustaka. Perumusan strategi pengentasan kemiskinan bagi WRSE dilakukan melalui analisis SWOT dan alternatif strategi diuji melalui indikator yang dikemukakan oleh Bardach.

Penelitian menyimpulkan beberapa temuan yaitu jumlah WRSE di Kota Semarang dalam tiga tahun terakhir mengalami peningkatan, namun kurang mendapat penanganan secara tepat, kebijakan pengentasan kemiskinan cenderung bersifat makro dan parsial dalam pelaksanaannya, implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan bagi perempuan di kota Semarang menurut pelaksana kebijakan bersifat top down, cenderung mengabaikan realitas sosial di lapangan sehingga menimbulkan konflik sosial masyarakat. Hal ini disebabkan ada kecenderungan sikap masyarakat yang merasa berhak mendapat bantuan. Kondisi ini cukup menyulitkan bagi pelaksana, yang pada akhirnya mengedepankan "pemerataan" daripada "ketepatan" sasaran, Kebijakan yang bersifat parsial dan tanpa didukung data base yang valid pada akhirnya merugikan kelompok sasaran. Program-program yang ada hanya dapat dimanfaatkan untuk menutup kebutuhan dasar dan bersifat sementara sehingga belum mampu mengentaskan kelompok WRSE dari jerat kemiskinan. Faktor-faktor penyebab kemiskinan di kalangan WRSE adalah a) faktor struktural, b) faktor sosial politik, c) faktor alam.

Penelitian ini merekomendasikan berbagai strategi pengentasan kemiskinan bagi WRSE antara lain: menyusun kebijakan-kebijakan spesifik yang lebih berorientasi pada partisipasi dan pemberdayaan WRSE, menggunakan anggaran pengentasan WRSE secara efisien dan efektif, menyusun data base WRSE, meningkatkan kualitas sumber daya manusia pelaksana program pengentasan WRSE, meningkatkan koordinasi antar lembaga pelaksana program pengentasan WRSE, meningkatkan peranan pihak swasta, LSM, dan pekerja sosial dalam pengentasan WRSE

Kata kunci : wanita rawan sosial ekonomi, startegi kebijakan, kemiskinan

## BAB VI PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan beberapa hal yaitu :

1. Jumlah Wanita Rawan Sosial Ekonomi di Kota Semarang dalam tiga tahun terakhir mengalami peningkatan, namun kurang mendapat penanganan secara tepat oleh pemerintah kota. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kebijakan maupun program yang dikelola oleh Bagian Sosial sebagai lembaga koordinator yang secara khusus tidak mengalokasikan dana untuk WRSE.
2. Kebijakan pengentasan kemiskinan di Kota Semarang cenderung bersifat makro dan parsial dalam pelaksanaannya. Hal ini terlihat dari berbagai kebijakan yang ditemukan di lapangan tidak tepat sasaran dan tidak mempertimbangkan keberlanjutan program. Misalnya : Bantuan Langsung Tunai, Beras Bagi Keluarga Miskin, dan Bantuan Usaha Kecil bagi pemilik usaha di lakosi penelitian.
3. Implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan bagi perempuan di kota Semarang menurut pelaksana kebijakan bersifat top down, cenderung mengabaikan realitas sosial di lapangan sehingga menimbulkan konflik sosial masyarakat. Hal ini disebabkan ada kecenderungan sikap masyarakat yang merasa berhak mendapat bantuan dari pemerintah. Kondisi ini cukup menyulitkan bagi pelaksana, yang pada akhirnya mengedepankan "pemerataan" daripada "ketepatan" sasaran.
4. Kebijakan yang bersifat parsial dan tanpa didukung data base yang valid pada akhirnya merugikan kelompok sasaran. Program-program yang ada hanya dapat dimanfaatkan untuk menutup kebutuhan dasar dan bersifat sementara sehingga belum mampu mengentaskan kelompok WRSE dari jerat kemiskinan.
5. Faktor-faktor penyebab kemiskinan di kalangan WRSE adalah a) faktor struktural yaitu mereka terlahir dari keluarga miskin sehingga berakibat

terhadap tingkat pendidikan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap jenis pekerjaan dan pendapatan mereka, b) faktor sosial politik yaitu adanya ketidakstabilan kondisi ekonomi negara yang berakibat terjadinya PHK bagi WRSE yang bekerja, c) faktor alam yaitu terjadinya rob yang terus menerus dihadapi oleh masyarakat di lokasi penelitian sehingga berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi maupun kemampuan saving yang seharusnya diperuntukan bagi pemenuhan kebutuhan dasar tetapi dipergunakan untuk perbaikan pemukiman.

## B. Rekomendasi

Mempertimbangkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan di lapangan maka strategi kebijakan yang direkomendasikan adalah :

1. Menyusun kebijakan-kebijakan spesifik WRSE pemerintah dalam rangka pengentasan WRSE yang lebih berorientasi pada partisipasi dan pemberdayaan WRSE
2. Menggunakan anggaran pengentasan WRSE secara efisien dan efektif
3. Menyusun data base WRSE kota Semarang
4. Meningkatkan kualitas sdm pelaksana program pengentasan WRSE
5. Meningkatkan koordinasi antar lembaga pelaksana program pengentasan WRSE
6. Meningkatkan peranan pihak swasta, LSM, dan pekerja sosial dalam pengentasan WRSE